

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali di kota-kota besar mengakibatkan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan kota tersebut. Kenaikan jumlah penduduk dapat disebabkan karena jumlah angka kelahiran yang relatif tinggi dan jumlah angka kematian yang relatif rendah. Selain itu kenaikan jumlah penduduk di suatu tempat/kota juga dapat disebabkan adanya migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu daerah/kota ke daerah/kota lain.

Kota-kota besar menawarkan sesuatu yang dianggap lebih dibanding dengan desa, oleh karena itu, penduduk desa berbondong-bondong untuk mengadu nasib di kota besar dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pada satu sisi pemikiran ini dianggap wajar karena setiap orang ingin hari depannya lebih baik, namun di sisi lain pemerintah kota akan mengalami masalah yang besar dengan adanya migrasi penduduk dari desa ke kota.

Persaingan kerja di kota besar akan meningkat, para pendatang baru yang tidak mempunyai keterampilan dan pengalaman kerja hanya akan menambah masalah yang terjadi di kota besar. Persoalan yang timbul akibat masalah ini seperti : angka pengangguran yang meningkat, kemiskinan yang meningkat sehingga taraf kehidupan masyarakat menjadi menurun dan pada akhirnya akan menyebabkan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat di perkotaan.

Pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah pusat selalu berupaya untuk menangani masalah kenaikan jumlah penduduk di kota-kota besar dewasa ini. Namun di sisi lain, keuangan negara / APBN terbatas untuk menangani masalah ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan program transmigrasi dan melakukan proyek-proyek padat karya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, untuk mensukseskan program pemerintah ini maka segenap elemen perlu berperan serta dalam proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penyandang dana dan fasilitator perlu merangkul pihak-pihak yang berkompeten. Maka diharapkan kerjasama yang baik akan mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek secara berkelompok. Selain itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk membuka wawasan kita sebagai mahasiswa dalam memandang secara arif dan bijaksana atas persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa ini khususnya masalah kependudukan yang kian hari perlu mendapat perhatian lebih dari kita semua. Tujuan lain dari penulisan makalah ini adalah memberikan sedikit gambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti melalui program transmigrasi dan proyek padat karya.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan tema yang diajukan dalam pembuatan makalah ini yakni transmigrasi padat karya, maka makalah ini hanya akan membahas mengenai transmigrasi dan proyek-proyek padat karya yang dilakukan pemerintah. Pembahasan mengenai hal tersebut tentunya tidak akan dilakukan secara mendetail mengingat keterbatasan pengetahuan kami sebagai mahasiswa, namun nantinya kita dapat bertukar pikiran melalui diskusi dan presentasi tentang makalah ini, sehingga diharapkan muncul gagasan-gagasan yang cemerlang untuk memberi masukan pada pemerintah sebagai regulator, penyandang dana dan fasilitator.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode telaah buku, dimana kami menggunakan buku yang relevan sebagai referensi. Selain itu kami juga menggunakan internet sebagai media untuk mencari informasi yang berguna bagi pembuatan makalah ini.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Perpindahan (Mobilitas) Penduduk Indonesia

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya perpindahan penduduk dari desa ke kota dan sebaliknya, perpindahan penduduk dari provinsi satu ke provinsi lain, dari pulau satu ke pulau lain, dan dari negara satu ke negara lain. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan mobilitas antara lain yaitu : ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan, agama, dan bencana alam.

Pola mobilitas penduduk secara garis besar ada dua :

2.1.1 Mobilitas Penduduk Tidak Permanen

Mobilitas penduduk tidak permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak bertujuan untuk menetap, hanya bersifat sementara. Perpindahan penduduk yang bersifat sementara disebut mobilitas sirkuler. Macam-macam mobilitas sirkuler adalah sebagai berikut :

1. *Mobilitas ulang-alik atau mobilitas harian*, Perpindahan penduduk yang bersifat rutin setiap hari, misalnya penduduk desa atau pinggiran kota yang pada pagi hari pergi ke kota untuk bekerja dan sore hari pulang ke desa.
2. *Mobilitas bermusim*, Perpindahan penduduk secara bermusim dan bersifat sementara, misalnya para buruh tani yang selama ada kegiatan pertanian di pedesaan mereka tinggal desa dan ketika tidak ada kegiatan pertanian di desa mereka pergi ke kota untuk mencari nafkah tambahan.

2.1.2 Pola Penduduk Permanen (Migrasi)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas negara atau batas administrasi (batas bagian) suatu negara dengan tujuan menetap. Migrasi dapat dibedakan menjadi dua.

1. *Migrasi Internasional* (migrasi antar negara)

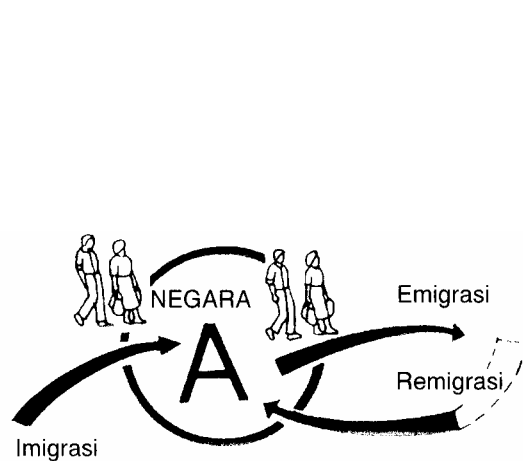
Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi internasional meliputi tiga hal.

- *Imigrasi* adalah masuknya penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi. Orang yang melakukan Imigrasi disebut *imigran*, contohnya orang Malaysia datang di Indonesia
 - *Emigrasi* adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang dituju. Orang yang melakukan emigrasi disebut *emigran*, contohnya orang Indonesia pindah ke Mesir.
 - *Remigrasi* atau repatriasi adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya (negara asalnya).
2. *Migrasi Nasional* (migrasi intern)

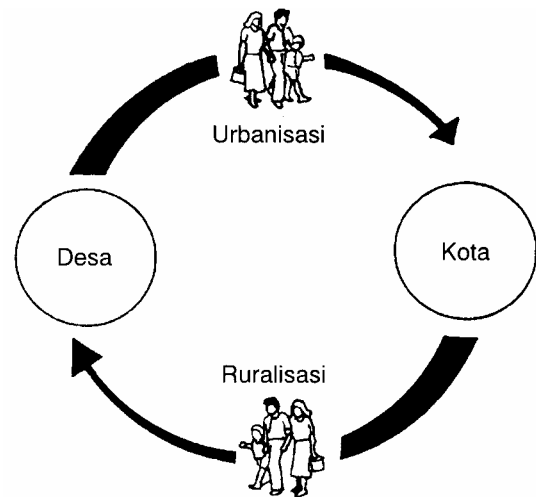
Migrasi nasional atau migrasi lokal adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu wilayah negara. Pola migrasi nasional adalah sebagai berikut.

- *Urbanisasi* adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar.
- *Transmigrasi* adalah perpindahan penduduk dari provinsi atau pulau yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau lain yang jarang penduduknya dalam satu wilayah negara.
- *Ruralisasi* adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa. Biasanya dilakukan oleh penduduk kota yang pulang kembali ke desanya.

Kecuali perpindahan penduduk di atas masih ada lagi perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik bersifat nasional maupun internasional, yaitu evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk untuk menghindari bahaya yang mengancam, misalnya bencana alam dan perang. Contoh evakuasi yang bersifat nasional ialah perpindahan penduduk di daerah Gunung Merapi, Yogyakarta. Contoh evakuasi yang bersifat internasional ialah perpindahan penduduk Palestina ke Saudi Arabia dan penduduk Kuwait ke Saudi Arabia karena perang. Jadi, pola mobilitas penduduk yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, mobilitas permanen (migrasi) yang meliputi urbanisasi, transmigrasi, ruralisasi, dan mobilitas tidak permanen atau mobilitas sirkuler yang meliputi mobilitas ulang-alik (harian) dan mobilitas bermusim.



Gambar Migrasi Internasional



Gambar Migrasi Nasional

2.2 Istilah-istilah Transmigrasi

- Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
- Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
- Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah.
- Wilayah pengembangan transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Satuan Kawasan Pengembangan adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa Satuan Permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang diizinkan menjadi desa utama.
- Permukiman transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

2.3 Asas, Tujuan, Sasaran dan Arah

- Penyelenggaraan Transmigrasi berasaskan : Kepeloporan, Kesukarelaan, Kemandirian, Kekeluargaan, Keterpaduan dan Wawasan Lingkungan.
- Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
- Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

2.4 Istilah-istilah Padat Karya

- Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.
- Padat Karya Pertanian bidang pengelolaan Lahan dan Air adalah suatu kegiatan padat karya yang melibatkan atau mepekerjakan petani, buruh tani atau warga perdesaan miskin lainnya pada kegiatan pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air untuk tujuan produktif di sektor pertanian.
- Penanggung Jawab Kegiatan Padat Karya (PKP) adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk wilayah kerjanya masing-masing.
- Koordinator Lapangan Padat Karya (Korlap) adalah petugas/staf teknis Dinas Pertanian Kabupaten yang ditunjuk oleh PKP, yang berfungsi sebagai sekretaris dengan tugas mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis kepada petugas lapangan padat karya.
- Bendaharawan adalah petugas administrasi sebagai pemegang uang kegiatan yang diangkat oleh PKP dan berasal atau merupakan staf pada Satuan Kerja (Satker) pada Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

- Juru Bayar/Pembantu Bendaharawan adalah staf bendaharawan pada Satuan Kerja (Satker) pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk yang bertugas membayar upah kerja padat karya.
- Petugas Lapangan Padat Karya (PLP) adalah Mantri Tani/Petugas Pertanian Kecamatan/KCD yang ditugaskan oleh PKP untuk melakukan pelaksanaan kegiatan seperti CP/CL, pembagian kelompok kerja, jadwal pelaksanaan, pengawasan kegiatan fisik di lapangan, pengerahan tenaga kerja dll.
- Pengawas Padat Karya adalah Pengawas Padat Karya adalah petugas yang bertugas mengawasi pelaksanaan padat karya agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawas padat karya dapat dilakukan oleh perangkat desa, LSM, atau lembaga lainnya.
- Petani/ Buruh Tani/ Pekerja adalah Tenaga kerja yang direkrut dari petani pemilik, petani penggarap, petani pemilik dan penggarap lahan, buruh tani, atau warga miskin setempat yang karena kondisi sosial dan ekonominya layak untuk diprioritaskan mengikuti padat karya.
- Kelompok Padat Karya (PK) adalah Kelompok peserta padat karya yang terdiri dari petani/buruh tani/warga miskin dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang.
- Infrastruktur pengelolaan lahan dan air adalah bangunan di tingkat desa/tingkat usaha tani baik berupa jalan usaha tani, jalan produksi, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Desa, sumur resapan, bangunan konservasi tanah dll yang berguna untuk mendukung pembangunan pertanian baik subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan.
- Hari Orang Kerja (HOK) adalah jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang besarnya bervariasi tergantung macam bangunannya.
- Jam Kerja adalah jumlah jam kerja per orang per hari (per HOK) yang besar atau jumlah jam kerjanya disesuaikan dengan upah tenaga kerja harian pada umumnya atau berlaku di lokasi padat karya yang bersangkutan.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Lebih Jauh Tentang Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Orang yang melakukan urbanisasi disebut urban. Contohnya orang-orang dari daerah pedesaan pergi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dari desa (daya tolak desa) dan faktor penarik dari kota (daya tarik kota).

1. *Faktor pendorong dari desa*

- Pemilikan tanah di desa semakin sempit sebagai akibat pertambahan penduduk yang cepat sehingga pendapatan rendah.
- Kesempatan kerja atau lapangan kerja di desa terbatas.
- Upah tenaga kerja rendah.
- Kurangnya fasilitas-fasilitas di desa, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, penerangan, dan hiburan.

2. *Faktor penarik dari kota*

- Kesempatan kerja di kota lebih banyak, misalnya di sektor industri, perdagangan, bidang jasa, dan sebagainya.
- Upah tenaga kerja lebih tinggi.
- Kota memiliki kemudahan fasilitas, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, penerangan, dan transportasi.
- Kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya.

Urbanisasi akan menimbulkan akibat, baik di daerah pedesaan yang ditinggalkan maupun di kota yang dituju. Akibat daridanya urbanisasi adalah sebagai berikut.

1. *Akibat negatif urbanisasi yang terjadi di desa antara lain :*

- Terjadi kekurangan tenaga muda karena pemuda banyak yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan,
- Sulit mencari tenaga terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan sebab mereka yang mempunyai pendidikan cukup tinggi tidak mau pulang

ke desanya, sedangkan yang tinggal di desa sebagian besar hanyalah anak-anak dan orang tua,

- Terhambatnya pembangunan di desa,
- Produktivitas pertanian dan sumber-sumber penghasilan di daerah pedesaan makin menurun sebab kekurangan tenaga pengelola.

2. *Akibat negatif urbanisasi yang terjadi di kota antara lain :*

- Di bidang kependudukan, semakin meningkatnya kepadatan penduduk di kota,
- Di bidang ekonomi, akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para urban sehingga meningkatnya pekerja kasar di kota, penghidupan semakin sulit, kesempatan kerja semakin sempit, dan jumlah pengangguran meningkat,
- Di bidang sosial, perumahan makin sulit diperoleh sehingga timbul golongan tunawisma (gelandangan), gubuk-gubuk liar, daerah pemukiman kumuh atau *slum area*, dan lingkungan kota menjadi kotor,
- Di bidang transportasi, sering terjadi kemacetan lalu lintas terutama di jalan-jalan besar, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, jumlah transportasi umum tidak mencukupi jumlah penumpang,
- Di bidang keamanan, meningkatnya angka kejahatan, seperti pencopetan, penodongan, pencurian, penipuan, dan perampokan.

Meskipun urbanisasi banyak membawa akibat negatif, ada juga akibat positifnya.

Akibat positif urbanisasi bagi desa :

- Mengurangi pengangguran di pedesaan,
- Mengurangi kepadatan penduduk di desa,
- Tertanamnya sifat dinamis masyarakat desa akibat pengaruh dan urban yang pulang ke desa, sehingga menunjang pembangunan desa.

Akibat positif urbanisasi bagi kota adalah dapat memperoleh tenaga kerja yang murah untuk pembangunan, terutama tenaga kerja kasar.

Usaha-usaha Mencegah atau Mengurangi Urbanisasi

Upaya pemerintah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya urbanisasi antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan pembangunan secara desentralisasi, yaitu pembangunan yang merata atau menyebar berpusat pada daerah-daerah, misalnya pembangunan di Indonesia berpusat pada empat kota. seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang. Masing-masing daerah akan mengembangkan daerah sekitarnya contohnya, untuk daerah Jakarta dikenal dengan istilah Jabotabek, di Surabaya dikenal dengan istilah Gerbangkertasusila. Dengan demikian, penduduk desa yang ingin mencari pekerjaan tidak perlu ke kota besar.
- Mengadakan modernisasi desa dengan program pembangunan.
- Memperbanyak fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat hiburan, dan transportasi.
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan melalui program keluarga berencana.
- Meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan, antara lain membangun irigasi, menggiatkan koperasi unit desa atau KUD
- Meningkatkan keamanan di pedesaan dengan lebih mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau siskamling.
- Mengeluarkan peraturan untuk mempersulit perpindahan penduduk desa ke kota, misalnya izin pindah ke kota sulit, Jakarta dinyatakan tertutup bagi pendatang baru.

Usaha-usaha untuk mengatasi akibat urbanisasi di kota besar sebagai berikut :

- Menertibkan gubuk-gubuk liar, pembuangan sampah, dan air limbah.
- Mengadakan penghijauan kota, yaitu mengadakan jalur hijau dan taman kota.
- Memperluas pemukiman dengan membangun kota satelit, yaitu kota kecil di sekitar kota besar.
- Menambah perumahan rakyat dengan membangun rumah murah, yaitu rumah susun, menambah sarana angkutan, jaringan listrik, air minum, dan sebagainya.

3.2 Lebih Jauh Tentang Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu provinsi atau pulau yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau lain yang jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, yang dimaksud transmigrasi adalah perpindahan atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap di daerah

lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Jadi, ditetapkannya transmigrasi adalah untuk kepentingan pembangunan.

3.3 Latar Belakang Lahirnya Transmigrasi

Indonesia adalah negara yang subur dan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat melimpah (mega biodiversity). Potensi keanekaragaman hayati tersebut merupakan salah satu yang terbesar di dunia setelah Zaire dan Brazil. Kekayaan sumber daya alam ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang harus bisa dimanfaatkan seefisien mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah tersebut, pasti diperlukan sumber daya manusia yang melimpah pula. Namun sayangnya potensi sumber daya manusia itu, tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Potensi sumber daya manusia Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa, Madura dan Bali. Kepadatan penduduk di pulau-pulau ini sampai sekarang adalah yang paling tinggi di Indonesia, padahal daya tampung dan daya dukung dari pulau-pulau ini untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan hidup bagi penduduknya sudah sangat minim.

Melihat ketimpangan antara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut, maka pemerintah mencanangkan suatu program khusus yang diberi nama transmigrasi. Transmigrasi merupakan istilah bahasa Indonesia untuk migrasi. Transmigrasi secara lebih spesifik merupakan pemindahan penduduk dari pulau-pulau yang terlalu padat penduduknya ke pulau-pulau yang kepadatan penduduknya masih cukup rendah dan potensi alamnya masih belum digarap secara lebih intensif.

Pola transmigrasi sebenarnya sudah cukup lama dikenal oleh bangsa Indonesia. Menurut sejarah, program transmigrasi awalnya diselenggarakan oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada masa penjajahan dengan nama kolonisasi pertanian, walaupun terdapat perbedaan istilah dengan program saat ini serta di dalamnya terdapat kepentingan kaum penjajah.

Pada masa itu, secara tidak langsung pemerintahan kolonial Belanda telah menerapkan pola transmigrasi dengan membawa banyak orang pribumi (terutama suku Jawa) untuk melakukan ekspansi ke pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti Sumatera dan Kalimantan. Orang-orang pribumi

tersebut awalnya dipekerjakan sebagai pembantu dan pelayan, atau tukang kebun bagi orang-orang Belanda.

Hingga adanya pergantian kekuasaan oleh pemerintahan pusat kolonial Belanda, maka mereka tetap mengabdikan pada satu majikan (*meneer*) yang sama hingga akhirnya sang majikannya harus pindah tugas ke tempat lain. Namun karena merasa betah dan merasa cukup sejahtera tinggal di pulau itu, maka orang-orang pribumi tadi tetap tinggal dan berkeluarga di tempat itu.

Penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari kebijakan mengenai ketransmigrasian di atas, jelas bahwa transmigrasi adalah suatu program yang sangat bijak dalam mengatasi masalah kependudukan. Tujuan utama transmigrasi sesuai dengan pengertiannya adalah dalam rangka penyebaran penduduk yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tujuan lain dari transmigrasi sesuai dengan konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor informal, mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah dan juga merupakan alternatif untuk mempertahankan keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.4 Faktor-faktor Penyebab Dilaksanakannya Transmigrasi

- Faktor kependudukan, Indonesia mengalami permasalahan di antaranya persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk Indonesia 61,1 % tinggal di Pulau Jawa dan Madura, sedang luas Pulau Jawa dan Madura hanya 6,9% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Jelas bahwa Pulau Jawa berpenduduk sangat padat, sedang pulau-pulau lain, seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya berpenduduk sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan melalui program transmigrasi. Daerah berpenduduk padat yang merupakan daerah asal transmigrasi adalah Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Lombok.
- Faktor ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, sedang para petani di Jawa rata-rata hanya memiliki lahan 0,3 hektar. Idealnya petani paling sedikit harus memiliki 2 hektar lahan. Bahkan, banyak petani di Jawa yang tidak memiliki lahan sehingga terdapat banyak

pengangguran tidak kentara, sedang pulau lain kekurangan tenaga untuk mengolah lahan.

- Faktor lain dilaksanakannya transmigrasi adalah karena bencana alam, daerahnya rawan terhadap bencana alam, daerahnya terkena proyek pembangunan misalnya akan dibangun waduk.

3.5 Tujuan Transmigrasi

Tujuan dilaksanakannya program transmigrasi adalah sebagai berikut :

- Meratakan persebaran penduduk Indonesia.
- Mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok.
- Mempertinggi kesejahteraan penduduk yang dipindahkan dan yang didatangi.
- Menambah tenaga kerja untuk pembangunan daerah-daerah yang jarang penduduknya.
- Memberi kesempatan kerja kepada petani yang menganggur di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok.
- Meningkatkan produksi pertanian, terutama bahan pangan.
- Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- Meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional.

3.6 Pemilihan Lokasi Transmigrasi

Awalnya program transmigrasi dikhususkan untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa, Madura, dan Bali yang memiliki persoalan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, ke pulau-pulau lain yang kepadatan penduduknya masih cukup rendah. Para transmigran dari pulau Jawa kebanyakan memilih pulau Sumatera, dan transmigran dari pulau Madura lebih terkonsentrasi ke pulau Kalimantan. Sedangkan transmigran dari pulau Bali lebih memilih pulau Sulawesi sebagai tujuannya.

Namun seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang cukup pesat, dan juga pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah melalui kebijakan Otonomi Daerah, maka pulau-pulau yang tadinya menjadi tujuan program transmigrasi telah berkembang dan harus dibatasi penerimaan transmigrannya. Bahkan yang berkembang adalah penduduk pulau Sumatera sekarang menjadi obyek yang akan mengikuti program transmigrasi. Hal ini sangat terasa dengan semakin tingginya kepadatan penduduk yang ditandai dengan semakin luasnya pembukaan wilayah hutan untuk pemukiman penduduk, untuk lahan pertanian,

perkebunan, dan peternakan dan juga untuk pembangunan sektor industri di pulau yang juga dikenal dengan nama pulau Andalas dan Swarna Dwipa ini.

Pemerintah harus segera merubah pola tujuan transmigrasi, agar pemerataan pembangunan dan kepadatan penduduk sesuai dengan tujuan transmigrasi dapat tercapai dengan maksimal dan efisien. Pulau-pulau terpencil mungkin bisa dijadikan alternatif tujuan program transmigrasi, walaupun alternatif ini akan lebih banyak memakan biaya operasional nantinya. Namun ini lebih baik daripada pemerintah memaksakan program transmigrasi untuk tetap dikirim ke pulau-pulau yang sama.

Pemilihan lokasi transmigrasi juga harus berdasarkan asas kelestarian lingkungan hidup (utamanya hutan). Dari perkembangan program transmigrasi nasional yang telah berlangsung semenjak pemerintahan orde lama, kita bisa melihat bahwa ada kesalahan dalam hal pemilihan lokasi transmigrasi. Kawasan konservasi yang merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup, sebisa mungkin dijauhkan dari lokasi transmigrasi. Hal ini perlu diterapkan untuk menghindari kesalahan pengelolaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alam yang dapat menimbulkan bencana.

Selain itu pemerintah dan semua stake-holder yang terkait dengan suksesnya program ini, harus menjalin kerjasama yang baik dan arif dalam menentukan pemilihan lokasi transmigrasi. Masyarakat lokal tempat tujuan transmigrasi akan dilakukan harus diajak untuk berdialog dan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di lokasi transmigrasi itu. Segala macam pendapat yang dikatakan masyarakat lokal harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada calon transmigran yang akan menempati areal tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat transmigran dan masyarakat lokal sehingga akan tercipta keharmonisan dalam berinteraksi dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan bersama-sama antara masyarakat lokal, masyarakat transmigran dan tentu saja pemerintah.

Kompetensi Calon Transmigran Tidak bisa dipungkiri bahwa program transmigrasi akan sangat menarik bagi masyarakat yang tingkat kehidupandan tingkat pendidikannya masih cukup rendah. Hal ini sangat wajar, melihat kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang masih belum pulih setelah diterpa krisis ekonomi, sehingga sangat sulit untuk mencari pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk dapat menciptakan masyarakat transmigran yang sukses dan mampu berkarya dalam sektor wiraswasta mandiri dengan menciptakan lapangan kerja baru, maka Pemerintah harus terus-menerus mencoba memperbaiki sistem perekrutan calon transmigran. Walaupun pada kenyataannya yang paling banyak mendaftarkan diri untuk menjadi masyarakat transmigran adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya cukup rendah.

Agar dapat mengatasi masalah tingkat pendidikan masyarakat transmigran yang cukup rendah tersebut, maka pemerintah daerah dan dinas transmigrasi daerah tempat calon transmigran berdomisili sebelum dikirimkan ke lokasi transmigrasi harus memberikan pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif sebelum masyarakat transmigran dikirim ke lokasi tujuan transmigrasi.

Hal ini sebaiknya dilakukan setelah diketahui kondisi ekonomi, sosial, budaya dan juga kondisi lahan yang akan mereka garap nantinya. Informasi mengenai hal ini mutlak harus diketahui oleh calon transmigran agar mereka mampu menggali kreatifitas dan potensi mengenai apa yang akan mereka coba buat di lokasi transmigrasi nantinya. Informasi ini juga sangat berguna dalam menciptakan sektor usaha kecil menengah baru yang potensial untuk diterapkan pada lokasi transmigrasi.

Dengan melakukan proses pendidikan melalui pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat transmigran juga diharapkan akan terjalin keharmonisan antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal setempat. Sehingga kebhinekaan yang ada di lokasi transmigrasi mampu menjadi rantai ikatan persatuan yang kuat untuk memupuk rasa persaudaraan dan nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fasilitas-fasilitas Transmigrasi Penyediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam mendukung program transmigrasi sampai sejauh ini sudah cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari pendapat para transmigran yang cukup berhasil di tanah seberang. Fasilitas yang disediakan pemerintah antara lain adalah lahan, bantuan dana dan alat-alat pertanian. Besarnya bantuan yang diberikan bervariasi tergantung kepada kondisi lahan yang akan dijadikan lokasi transmigrasi.

Setiap kepala keluarga yang mengikuti program ini rata-rata mendapatkan lahan garapan seluas 2 - 2,5 hektar dan juga mendapatkan bantuan dana sebagai modal untuk mengelola lahan tersebut sebesar 16 - 20 juta rupiah. Selain itu pemerintah juga menyediakan alat-alat pertanian dan brosur-brosur penyuluhan tentang cara

mengelola lahan yang baik dan jenis tanaman budidaya apa yang cocok untuk ditanam pada lahan tersebut.

Pada lokasi transmigrasi juga disediakan rumah tinggal tipe RSS yang telah dialiri listrik dan air bersih. Kondisi pemukiman yang berada dalam satu kawasan juga diciptakan seperti layaknya sebuah desa pada umumnya, dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Setiap UPT memiliki struktur pemerintahan yang setara dengan sebuah desa dan memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat transmigran. Bahkan hal ini menimbulkan kecemburuan dikalangan masyarakat lokal yang dapat menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat lokal dengan masyarakat transmigran.

Melihat kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap para transmigran tersebut, maka sangat wajar kalau pemerintah berharap agar tujuan program ini mampu tercapai dengan maksimal. Semua kalangan yang telah bekerja keras dalam menyumbangkan konsep dan pemikiran mengenai hal ini juga mempunyai harapan yang sama dengan pemerintah. Namun pemerintah harus mewaspadaai potensi konflik yang timbul akibat adanya kecemburuan masyarakat lokal terhadap masyarakat transmigran.

Kecemburuan yang timbul pada kalangan masyarakat lokal tersebut bukan tanpa sebab. Percepatan pembangunan yang terjadi di UPT-UPT transmigrasi tidak sejalan dengan percepatan pembangunan desa tempat masyarakat lokal bermukim. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, maka potensi konflik yang ber-unsur SARA akan sering terjadi pada lokasi-lokasi transmigrasi. Pemerintah harus arif dalam membuat sistem ketransmigrasian, terutama jika menyangkut pembangunan daerah. Fasilitas di pemukiman transmigrasi tidak bisa terlalu berlebihan dengan fasilitas masyarakat lokal. Jika pemerintah memaksakan diri untuk melengkapai fasilitas masyarakat transmigran, maka terlebih dahulu pemerintah harus melengkapi atau minimal memperbaiki dan menyempurnakan fasilitas masyarakat lokal setempat.

Semua fasilitas yang memang sudah seharusnya disediakan pemerintah kepada rakyat tersebut, pasti akan mampu mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Ini merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi untuk menciptakan pemerataan di masyarakat, baik itu pemerataan jumlah penduduk, pemerataan pembangunan dan tentu saja pemerataan kesejahteraan.

Dari daerah-daerah asal tersebut di atas diutamakan daerah sebagai berikut :

- Kepadatan penduduknya lebih dan 1.000 jiwa/km²,
- Daerah kritis atau tandus yang akan dihijaukan,
- Penduduknya berpenghasilan sangat rendah,
- Daerahnya rawan terhadap bencana alam,
- Daerahnya akan digunakan untuk tempat pembangunan proyek-proyek penting, misalnya waduk.

Daerah tujuan transmigrasi :

- Pulau Sumatra, meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, DI Aceh, dan Lampung. Sekarang Lampung menjadi daerah asal transmigrasi.
- Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Pulau Sulawesi, meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
- Pulau Irian, Maluku, NTB.

Syarat-syarat daerah yang menjadi tujuan transmigrasi :

- Tanahnya subur.
- Sumber pengairan dan sistem pengairan baik.
- Sarana transportasi baik.
- Kemungkinan pemasaran hasil produksi baik.
- Tersedianya sarana kesehatan dan pendidikan.
- Terdapat tanaman yang dapat dikembangkan.

Syarat-syarat bagi orang yang akan bertransmigrasi :

- Warga negara Indonesia asli.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Sudah berkeluarga.
- Kepala keluarga berusia antara 18 - 45 tahun.
- Anggota keluarga yang ikut berusia 6 - 60 tahun.
- Mempunyai kemampuan dan keterampilan.
- Berkelakuan baik.

Seseorang yang akan bertransmigrasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Namun, ada golongan masyarakat tertentu yang mendapat prioritas utama untuk menjadi peserta transmigrasi umum, antara lain :

- Petani yang tidak memiliki tanah garapan,
- Penduduk dan daerah yang tertimpa bencana alam, dan
- Anggota ABRI yang menghadapi masa pensiun.

Sesuai dengan tujuan penyusunan profil kawasan transmigrasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi di daerah otonomi. Mengacu pada pengertian Kawasan Transmigrasi menyebutkan bahwa : Kawasan Transmigrasi adalah Kawasan budidaya intensif ditetapkan untuk menampung perpindahan penduduk secara menetap dalam jumlah besar dengan susunan fungsi-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintah sosial dan kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam operasionalnya Pengertian Kawasan Transmigrasi :

- Suatu kesatuan Hampan lahan dalam kawasan budidaya yang terletak dalam suatu administrasi otonomi, terdiri atas :
- Desa-desa eks Unit Permukiman Transmigrasi (PTD)
- Unit-unit Permukiman Transmigrasi yang sedang dibina (PTA)
- Desa-desa sekitar Permukiman Transmigrasi yang merupakan penduduk setempat (PTS)
- Areal-areal yang potensial untuk pengembangan permukiman transmigrasi (PTB)
- Berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan
- Terhubungnya dalam suatu kesatuan jaringan jalan yang dapat merangsang tumbuhnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

3.7 Jenis-jenis Transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik. Semula hanya diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sekarang departemen lain, pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi ikut berperan serta, bahkan ada yang diselenggarakan perorangan atas kemauan sendiri. Jenis-jenis transmigrasi antara lain sebagai berikut.

1. *Transmigrasi umum*

Transmigrasi umum adalah pengiriman transmigrasi yang pelaksanaannya dan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Pembiayaan tersebut meliputi biaya perjalanan dari daerah asal sampai tujuan, biaya hidup satu tahun di tempat yang baru, tanah yang telah dibuka seluas 2 hektar, peralatan pertanian, rumah, dan bibit.

2. *Transmigrasi khusus*

Transmigrasi khusus adalah transmigrasi yang diselenggarakan dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya penduduk yang tertimpa bencana alam, pengangguran dan tunawisma di kota-kota besar, para karyawan yang ditugaskan dalam pembangunan proyek-proyek di daerah. Transmigrasi macam ini disebut transmigrasi sektoral, penyelenggaraannya diurus oleh pemerintah daerah asal bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi. Bentuk-bentuk transmigrasi khusus yang lain adalah sebagai berikut.

- **Transmigrasi integral ABRI**

Transmigrasi integral ABRI adalah transmigrasi yang diselenggarakan khusus untuk anggota ABRI yang menghadapi masa pensiun. Contohnya ialah Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) di Kalimantan Barat, Transmigrasi Angkatan Laut (Transal) di Lampung, dan Transmigrasi Angkatan Udara (Transau) di Lampung.

- **Transmigrasi bekas pejuang**

Transmigrasi bekas pejuang adalah transmigrasi khusus untuk bekas pejuang dalam perang kemerdekaan, ditempatkan di daerah transmigrasi Kalimantan.

- **Transmigrasi Pramuka taruna bumi**

Transmigrasi ini dilakukan oleh para pramuka dengan tujuan sebagai pelopor pembangunan di daerah transmigrasi. Pemrakarsanya adalah pemerintah daerah Kabupaten Jombang (Jawa Timur). Proyek transmigrasi ini yang pertama di Lampung.

- **Transmigrasi Komite Nasional Pemuda Indonesia**

Transmigrasi ini terdiri atas keluarga muda anggota KNPI dari seluruh Indonesia, misalnya para transmigran KNPI Jawa Timur dikirim ke Salim Batu, Kalimantan Timur.

3. *Transmigrasi bedol desa*

Transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang meliputi seluruh penduduk desa beserta pejabat-pejabat pemerintah desa. Transmigrasi ini dilaksanakan karena daerah asal para transmigran akan digunakan untuk tempat pembangunan proyek penting. Contohnya ialah penduduk Wonogiri (Jawa Tengah) bertransmigrasi ke Sitiung (Sumatra Barat) karena daerahnya digunakan untuk pembangunan Waduk Gajah Mungkur dan transmigrasi penduduk daerah Kedungombo (Jawa Tengah).

4. *Transmigrasi lokal*

Transmigrasi lokal adalah transmigrasi dari suatu daerah ke daerah lain dalam provinsi yang sama. Contohnya adalah perpindahan penduduk antar kabupaten di Lampung dan di Kalimantan Timur.

5. *Transmigrasi spontan*

Transmigrasi spontan adalah transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kesadaran, kemauan, dan biaya sendiri. Apabila transmigran mengajukan permohonan, pemerintah akan memberi bantuan berupa tanah yang belum dibuka seluas dua hektar, tanah tersebut masih berupa hutan.

6. *Transmigrasi swakarsa*

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi semacam transmigrasi spontan. Jadi, pembiayaan sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh transmigran dan dapat pula pembiayaan dari pihak lain yang bukan pemerintah. Untuk pelaksanaannya pemerintah memberi petunjuk dan bimbingan kepada para transmigran. Di tempat tujuan mereka mendapat lahan pekarangan seluas seperempat hektar setiap keluarga. Dalam Repelita V telah dikembangkan beberapa jenis transmigrasi swakarsa yang pelaksanaannya mendapat prioritas, di antaranya sebagai berikut.

- *Transmigrasi Swakarsa PIR (Perkebunan Inti Rakyat)*

Transmigrasi ini diarahkan pada pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai perkebunan inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat. Dengan demikian, akan terbentuk kerja sama yang menguntungkan antara perkebunan rakyat dengan

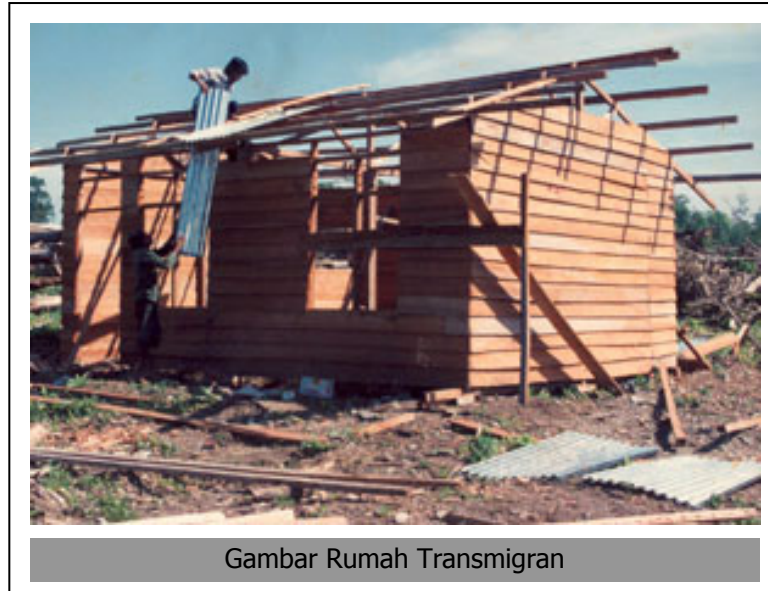
perkebunan besar, hasil dari perkebunan transmigran ditampung, diolah, dan dipasarkan oleh perkebunan besar. Pola transmigrasi swakarsa PIR telah dilaksanakan di Sumatra dan Kalimantan di daerah perkebunan karet dan kelapa sawit.

- *Transmigrasi Swakarsa Hutan Tanaman Industri (HTI)*
Transmigrasi ini dikaitkan dengan upaya pengembangan tanaman hutan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya industri kayu lapis, mebel, kertas, bahan bangunan, dan bahan kerajinan. Para transmigran akan mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari dinas kehutanan dan memperoleh kesempatan memiliki saham dalam perusahaan pemegang hak perusahaan HTI.
- *Transmigrasi Swakarsa Jasa Industri (JIN)*
Tujuan dari transmigrasi ini adalah agar mereka mendapat pekerjaan di bidang industri atau jasa sehingga mereka dapat mengisi kekurangan tenaga kerja industri yang sudah ada atau mendirikan industri sendiri. Sebelum berangkat, para transmigran mendapat bimbingan teknis, penyuluhan, dan latihan keterampilan di bidang industri.
- *Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial (Transabang Dep)*
Pelaksanaan transmigrasi ini dikoordinasi oleh Departemen Dalam Negeri. Para transmigran ditempatkan di desa yang sudah ada dan sebelum berangkat mendapat latihan dan penyuluhan. Mereka mendapat lahan seluas satu seperempat hektar.
- *Transmigrasi Swakarsa Pola Usaha Perikanan Tani dan Tambak*
Transmigrasi ini dikaitkan dengan upaya pengembangan usaha perikanan, baik sebagai nelayan maupun perikanan tambak.

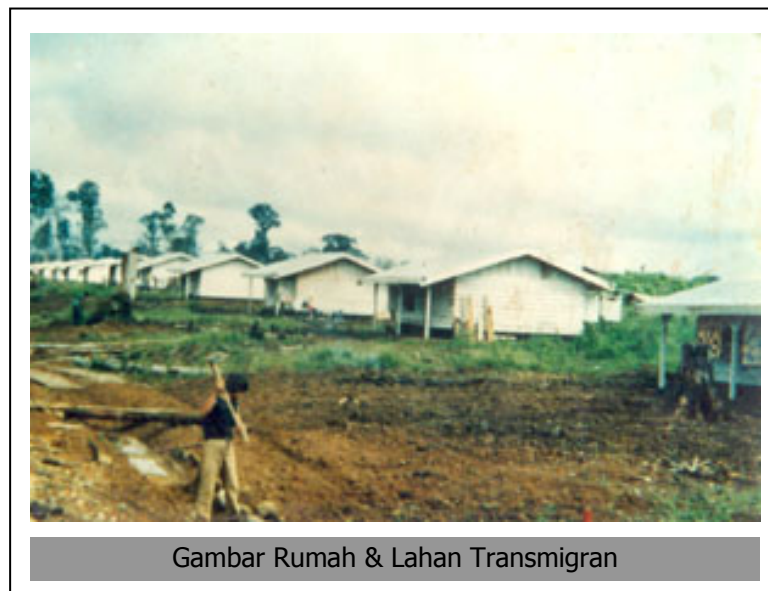
3.8 Penyiapan Sarana Dan Prasarana Permukiman Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan daerah melaksanakan pembangunan pedesaan baru dan rehabilitasi serta peningkatan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang sudah ada untuk mendukung perkembangan permukiman transmigrasi dan desa sekitarnya. Pembangunan pedesaan baru meliputi pembangunan desa-desa baru yang terintegrasi dalam satuan kawasan pengembangan (SKP) dan wilayah pengembangan parsial,

hinterland dari pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada dan mendorong pertumbuhan desa-desa yang kurang berkembang melalui penambahan penduduk dan pembangunan prasarana.



Untuk itu pada tahun anggaran 2004, pembangunan transmigrasi baru (PTB) telah membangun sarana antara lain, pembangunan rumah 12.675 unit, ramuan rumah 1 unit, perpipaan 14 paket, sumur gali 2.455 unit, gentong plastik 11.463 buah dan pompa tangan 5 buah pada 30 provinsi.



Disamping itu, pembangunan transmigrasi yang sudah ada (PTA) juga telah melaksanakan rehabilitasi Rumah Tinggal dan Jamban Keluarga sebanyak 159 unit. pada 24 provinsi.

Pembangunan transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan daerah melaksanakan pembangunan pedesaan baru dan rehabilitasi serta peningkatan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang sudah ada untuk mendukung perkembangan permukiman transmigrasi dan desa sekitarnya. Pembangunan pedesaan baru meliputi pembangunan desa-desa baru yang terintegrasi dalam satuan kawasan pengembangan (SKP) dan wilayah pengembangan parsial, hinterland dari pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada dan mendorong pertumbuhan desa-desa yang kurang berkembang melalui penambahan penduduk dan pembangunan prasarana.



Gambar Jembatan Transmigran

Untuk itu pada tahun anggaran 2004, pembangunan transmigrasi baru (PTB) telah membuka areal lahan baru seluas 5.293,07 Ha, pembangunan jalan berupa jalan penghubung/poros sepanjang 168,19 Km dan jalan desa sepanjang 334,29 Km, jembatan kayu 1.262 Meter, jembatan semi permanen 322 Meter, jembatan beton semi standart 122 Meter, gorong-gorong jalan phb/poros 2.882 meter, gorong-gorong jalan desa 1.605 meter, drainase 18.560 meter, dermaga 232 meter, pada 30 provinsi.

Disamping itu, pembangunan transmigrasi yang sudah ada (PTA) juga telah melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jalan sepanjang 66,03 Km, jalan desa 2,25 km, jembatan kayu 203 Meter, jembatan semi permanen 97 Meter, gorong-gorong jalan phb/poros 2.925 meter, gorong-gorong jalan desa 16 meter pada 24 provinsi.



Gambar Lahan Pertanian Transmigran

3.9 Hasil Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi

Program Transmigrasi memang unik dan sangat khas di Indonesia. Dalam program ini, pemerintah secara aktif terlibat langsung dalam memindahkan penduduk dalam jumlah besar, menyeberangi lautan dan berlangsung terus menerus dalam waktu cukup lama. Salah satu peranan program transmigrasi yang menonjol ialah pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. Program transmigrasi juga merupakan kegiatan investasi, baik dalam bentuk *human insvestment* maupun *capital insvesment*.

Sebagai proyek invesment, program transmigrasi memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Sebagai capital invesment transmigrasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan PDRB wilayah.

Secara umum program transmigrasi berdampak sangat luas terhadap pembangunan wilayah, dilihat dari sudut tata ruang wilayah melalui permukiman wilayah-wilayah terisolasi, serta pemanfaatan ruang wilayah maupun dalam bentuk pembangunan ekonomi wilayah.

Sebagai gambaran umum pemindahan / penempatan penduduk dari Jawa ke luar Jawa yang lebih menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pembangunan transmigrasi, dibidang human insvesment (penempatan transmigran) pada daerah transmigrasi dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu; Pada tahap Kolonisasi yang

dimulai pertama kali pada tahun 1905 yaitu pada bulan Nopember mulai diberangkatkan sejumlah 155 KK yang berasal dari Karesidenan Kedu - Jawa Tengah menuju Tanjung Karang - Lampung. Pada tahap Kolonisasi (1905 - 1942) telah dipindahkan penduduk dari Pulau Jawa sebanyak 60.155 KK menuju sembilan propinsi di luar Pulau Jawa. Pada tahap Pra-PELITA (1950 - 1968) telah dipindahkan / ditempatkan sebanyak 98.631 KK, pada tahap PELITA satu sampai dengan PELITA enam (1969 - 1998) telah ditempatkan sebanyak 1.808.823 KK, pada Tahun 2000 telah ditempatkan 6.756 KK, pada tahun 2001 ditempatkan sebanyak 22.609 KK, tahun 2002 ditempatkan sebanyak 23.907 KK, tahun 2003 ditempatkan sebanyak 19.678 KK, tahun 2004 ditempatkan sebanyak 14.821 Kk dan pada tahun 2005 ditempatkan 619 KK.

Tahun	Jumlah KK
1905	155
1905-1942	60.155
1950-1968	98.631
1969-1998	1.808.823
2000	6.756
2001	22.609
2002	23.907
2003	19.678
2004	14.821
2005	619

3.10 Pengaruh Mobilitas Penduduk terhadap Jumlah dan Mutu Penduduk

Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu tempat ke tempat lain dapat menimbulkan pengaruh terhadap jumlah dan mutu penduduk, baik terhadap daerah yang ditinggalkan maupun daerah yang didatangi.

Pengaruh terhadap daerah yang ditinggalkan

Pengaruh positif :

- Mengurangi jumlah penduduk sehingga kepadatan penduduk berkurang.
- Mengurangi jumlah pengangguran di daerah asal.
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga, misalnya bagi mereka yang pergi untuk mencari pekerjaan, setelah mendapat penghasilan dikirimkan kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga kebutuhan-kebutuhan utamanya dapat terpenuhi. Contohnya para tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, orang desa yang berhasil mendapatkan pekerjaan di kota, dan sebagainya. Bagi

mereka yang pergi menuntut ilmu, apabila kembali ke daerah asal menjadi pelopor dalam pembangunan sehingga dapat memperbaiki mutu penduduk.

Pengaruh negatif :

- Berkurangnya tenaga kerja yang muda karena yang pergi umumnya orang muda.
- Stabilitas keamanan kurang kuat sebab penduduknya tinggal yang tua-tua.

Pengaruh terhadap daerah yang didatangi

Pengaruh positif :

- Jumlah tenaga kerja bertambah. Untuk mengembangkan daerah baru, misalnya daerah transmigrasi, sangat dibutuhkan banyak tenaga kerja. Akan tetapi, jika yang mereka datangi adalah kota besar kemungkinan akan terjadi penumpukan tenaga kerja sehingga memperbesar pengangguran.
- Meningkatkan ekonomi penduduk. Dengan bertambahnya tenaga kerja produktifitas meningkat.

Pengaruh negatif :

Di kota-kota besar tingkat mobilitas penduduk tinggi sehingga dapat menimbulkan pengaruh negatif, antara lain :

- Memperbesar jumlah penduduk sehingga kepadatan penduduknya semakin tinggi,
- Lapangan kerja semakin berkurang,
- Timbul masalah-masalah sosial, misalnya banyaknya tunawisma, gelandangan, dan pemukiman kumuh (gubuk liar), dan
- Meningkatnya kriminalitas.

3.11 Penciptaan Pendapatan Pada Masa Transisi

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja dilakukan melalui kegiatan padat karya yang difokuskan pada kegiatan "cash for work". Prinsip-prinsip pekerjaan padat karya perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan kesempatan memperoleh pekerjaan, termasuk mempertimbangkan efisiensi biaya :

- Peluang kerja sangat terbuka dalam pekerjaan prasarana. Pemilihan teknologi (antara kegiatan padat karya dan kegiatan padat modal) merupakan faktor utama dalam menentukan berapa banyak kesempatan kerja yang dapat diciptakan. Bila diterapkan dengan baik, kegiatan padat karya dapat

menciptakan sampai sekurang-kurangnya tiga kali kesempatan kerja dibanding dengan penerapan kegiatan padat modal, tanpa menimbulkan dampak negatif pada biaya, mutu dan lamanya pelaksanaan pekerjaan. (pengalaman internasional, rasio antara tenaga teknik dan pekerja tidak terampil dalam kegiatan padat karya adalah 1:500 untuk insinyur, 1:100 untuk teknisi, 1:100 untuk pengawas, 1:50 untuk sub-kontraktor dan 1:20 untuk mandor).

- Pekerjaan pembuatan jalan dan pembangunan prasarana lainnya (jembatan, gorong-gorong, selokan-saluran) dapat dilaksanakan dengan menggunakan kontraktor berskala kecil. Pengalaman di berbagai negara Asia menunjukkan bahwa penggunaan kontraktor berskala kecil dapat menghasilkan manfaat hemat-biaya, karena para kontraktor ini dalam banyak hal akan melaksanakan kegiatan dengan metode padat karya digabungkan dengan sumber daya setempat.
- Menggunakan sumber daya setempat dan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, akan menjamin kelangsungan dari aset yang dibangun. Misalnya dengan memperluas program KDP (kecamatan development Programme) yang tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, melainkan juga peningkatan kemampuan untuk memelihara aset itu sendiri.
- Pola *cash-for-work* dikembangkan sebagai kegiatan tanggap darurat dan dapat mempekerjakan sekitar 50.000 orang. Dengan asumsi bahwa umumnya mereka bekerja dengan 1 pengawas dan 5 mandor tiap 100 pekerja, sedikitnya diperlukan 500 pekerja terampil dan 2500 tenaga kerja tidak terampil.
- Bantuan teknik perlu diberikan selama perumusan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan jalan untuk mendukung diberlakukannya metode padat karya secara penuh.

3.12 Program Padat Karya ILO Untuk Korban Tsunami (Jakarta, Kompas)

Organisasi Buruh Internasional (ILO), dalam siaran pers yang diterima Kamis (20/1), menegaskan bahwa strategi penciptaan lapangan kerja padat karya akan diintegrasikan dengan upaya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi bagi korban bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Asia. Perkiraan kasar ILO menyebutkan sekitar satu juta orang di Indonesia dan Sri Lanka kehilangan mata pencahariannya.

ILO menyatakan respons bagi tragedi tsunami memerlukan "pemulihan padat karya, dengan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan kelompok paling rentan dan pembangunan kembali mekanisme perlindungan sosial".

Demikian makalah strategi yang dikeluarkan oleh Kantor Regional ILO di Bangkok, yang dipaparkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama lima hari mengenai penanggulangan bencana yang dibuka di Kobe, Jepang, Selasa (18/1) lalu. Upaya ini masih akan ditambah lagi dengan berbagai upaya pemerintah serta multilateral yang bersifat lebih luas.

Dalam kajian awal disebutkan, sekitar 600.000 orang kehilangan mata pencaharian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau sekitar 30 persen penganggur dibandingkan dengan tingkat 6,8 persen sebelum terjadinya bencana. Sedangkan lebih dari 400.000 pekerja di bagian timur, selatan, dan barat wilayah pantai yang terkena bencana di Sri Lanka kehilangan mata pencaharian, menyebabkan angka pengangguran di provinsi yang terkena bencana menjadi lebih dari 20 persen dari 9,2 persen sebelum terjadinya bencana.

ILO menyebutkan mayoritas pekerjaan yang hilang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah di bidang perikanan, bisnis skala kecil, pertanian, dan usaha kecil yang tidak terdaftar. Sementara mayoritas pekerjaan yang hilang di Sri Lanka, industri perikanan, hotel, dan pariwisata (termasuk ekopariwisata), serta ekonomi informal.

Dokumen strategi yang dikeluarkan ILO juga menyebutkan bantuan serta dukungan yang cukup memadai dalam membangun kembali, perbaikan, dan penempatan infrastruktur fisik, termasuk pada tempat serta peralatan untuk memulihkan mata pencaharian. Juga, melakukan pembangunan kembali sistem perlindungan sosial sehingga mampu memberdayakan masyarakat yang tertimpa bencana.

Antara 50 hingga 60 persen korban bencana diharapkan mampu menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri pada akhir 2005. Di sisi lain juga mampu mengembalikan 85 persen dari seluruh pekerjaan yang dikerjakan dalam jangka waktu 24 bulan ke depan.

3.13 Studi Kasus : Pelaksanaan Padat Karya Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Lahan Dan Air



Gambar Proyek Padat Karya

A. TUJUAN KEGIATAN

1. Menyediakan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja baik petani, buruh tani, warga miskin lainnya di lokasi pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pengelolaan lahan dan air.
2. Memberikan kompensasi kepada para petani maupun buruh tani yang berkurang atau bahkan kehilangan pendapatan akibat kekeringan/serangan hama/over produksi dll.
3. Mendayagunakan tenaga kerja petani, buruh tani, atau warga miskin lainnya yang menganggur karena tidak ada kegiatan usaha tani/lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja setempat ("*off season job opportunity*").
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur pengelolaan lahan dan air serta sekaligus meningkatkan kebersamaan, tanggung jawab dan rasa memiliki petani setempat terhadap bangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang telah mereka bangun.
5. Memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

B. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan padat karya ini adalah para petani dan atau buruh tani serta warga miskin lainnya (tergantung kebijakan dan kearifan kepala desa setempat) yang umumnya lemah tingkat kesejahteraan sosial maupun ekonominya.

C. KRITERIA KEGIATAN

Kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ini adalah :

1. Banyak menyerap tenaga kerja dan tidak memerlukan teknologi tinggi maupun alat-alat berat.
2. Kegiatan bersifat produktif dan bermanfaat baik bagi pekerja (petani/buruh tani/warga miskin) maupun masyarakat luas.
3. Pekerjaan yang dikerjakan merupakan fasilitas umum (public facility) berupa infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan golongan maupun perseorangan.
4. Mempunyai dampak yang berkelanjutan
5. Upah tenaga kerja dibayarkan langsung kepada pekerja.
6. Pekerja adalah orang dewasa (bukan anak-anak) dan pekerjaan tidak boleh diborongkan.
7. Kegiatan mempunyai dampak bagi pemberdayaan perekonomian petani.
8. Kegiatan bersifat mendukung program pembangunan daerah, tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat luas.
9. Kegiatan menggunakan teknologi sederhana, tepat guna dan dapat dikelola dengan manajemen sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

D. SIFAT KEGIATAN

Kegiatan padat karya yang dilaksanakan bersifat produktif, berdampak positif di sektor pertanian, mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendukung program ketahanan pangan nasional serta bermanfaat bagi petani khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership belonging*) para petani terhadap aset bangunan sarana dan prasarana lahan dan air yang memang menjadi tanggung jawab petani untuk mengelola dan melestarikannya.

E. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap persiapan ini kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan meliputi :

1. Penunjukkan personil pelaksana

Dengan memperhatikan ketentuan yang ada, penanggung jawab kegiatan yang didalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten menunjuk: koordinator lapangan (Korlap), PLP, dan Pengawas atau tim pemantau.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

Penanggung jawab kegiatan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menyangkut aspek lokasi, jenis pekerjaan, pembiayaan, jadwal waktu pelaksanaan dll (Rencana Operasional/RO).

3. Penyediaan biaya

Agar kegiatan yang direncanakan tersebut diatas dapat terlaksana tepat pada waktunya maka bendaharawan sebagai pemegang uang kegiatan harus menyediakan biaya yang diperlukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

a. Biaya dalam pelaksanaan padat karya ini adalah merupakan bantuan pemerintah pusat melalui dana Tugas Perbatuan ke kabupaten langsung. Dana ini sepenuhnya dialokasikan untuk upah tenaga kerja kepada para petani dan buruh tani atau warga miskin peserta padat karya.

b. Diharapkan untuk kegiatan penyediaan kebutuhan fisik berupa pasir, semen, batubata dan lain-lain serta untuk biaya operasional dan administrasi kegiatan seperti honorarium/perjalanan Penanggung Jawab Kegiatan, Pengawas Lapangan, Petugas Pelaksana Lapangan dan lain-lain disediakan melalui APBD I/II.

c. Sebagai bagian integral dari laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air yang ada di kabupaten maka kabupaten pelaksana wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan fisik maupun keuangan ke Propinsi dan kompilasi atau rekapitulasinya dikirimkan ke Pusat oleh Propinsi.

4. Pendaftaran seleksi peserta padat karya

Dari sekian banyak petani, buruh tani, warga miskin yang ada dilakukan pendaftaran/seleksi calon peserta padat karya yang benar-benar layak sesuai dengan criteria yang ada.

5. Pematokan

Sebelum kegiatan fisik dimulai perlu dilakukan pengecekan kembali keadaan lokasi. Selanjutnya dipasang profile dari kayu atau bambu sesuai dengan kondisi bangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang akan dibangun atau direhabilitasi. Pemasangan profile dilakukan oleh petugas lapangan padat karya (PLP) bersama dengan petani atau warga setempat.

F. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang perlu dilakukan meliputi :

1. Pencatatan Tenaga Kerja, Pada hari pertama sebelum pekerjaan dimulai petugas lapangan padat karya (PLP) wajib mengecek daftar nama petani, buruh tani, dan warga miskin lainnya sebagai peserta padat karya.
2. Pengaturan Pembagian Kerja, petugas lapangan padat karya (PLP) dan petugas lapangan membagi dan mengatur pekerja dalam beberapa kelompok yang beranggotakan sekitar 20 orang. Kemudian PLP tersebut membagi tugas dan pekerjaan pada kelompok-kelompok padat karya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal kegiatan fisik yang ditentukan.
3. Koordinator lapangan padat karya bertugas mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan arahan teknis kepada petugas lapangan padat karya.
4. Setiap pekerja berhak mendapatkan pekerjaan padat karya selama + 10 HOK (Hari Orang Kerja) atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
5. Pembayaran Upah Tenaga Kerja, pembayaran upah tenaga kerja dilakukan oleh pembantu bendaharawan atau juru bayar yang sebelumnya harus mengajukan permohonan uang muka kerja bagi upah tenaga kerja minggu yang sedang berjalan. Upah tenaga tenaga kerja per Hari Orang Kerja (HOK) adalah seragam untuk seluruh kabupaten pelaksana padat karya yaitu Rp. 25.000 per HOK.
6. Setiap pengajuan uang muka kerja harus disertai dengan keterangan atau pernyataan dari Petugas lapangan padat karya tentang jumlah pekerja proyek yang harus dibayar selama minggu yang bersangkutan.

G. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pada dasarnya pengawasan dan pengendalian padat karya dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan baik masyarakat maupun instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap pembangunan atau wilayah desa yang bersangkutan.
2. Pengendalian terhadap pelaksanaan padat karya sehari-hari dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan padat karya (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten) berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan secara intensif dan efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara.
4. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik dan pembagian upah dilakukan oleh pengawas lapangan padat karya.

H. PEMBIAYAAN

1. Upah tenaga kerja pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air bersumber dari dana Tugas Pembantuan yang berada di masing-masing Kabupaten/ Kota pelaksana padat karya.
2. Biaya operasional kegiatan persiapan, pelaksanaan, pembinaan dan pemantauan serta kegiatan terkait lainnya menjadi beban Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.
3. Bila tidak tersedia dana pengadaan material bangunan, dananya dapat disediakan dari sumber APBD I/APBD II/ Swadaya masyarakat petani sendiri.

I. EVALUASI

Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan padat karya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

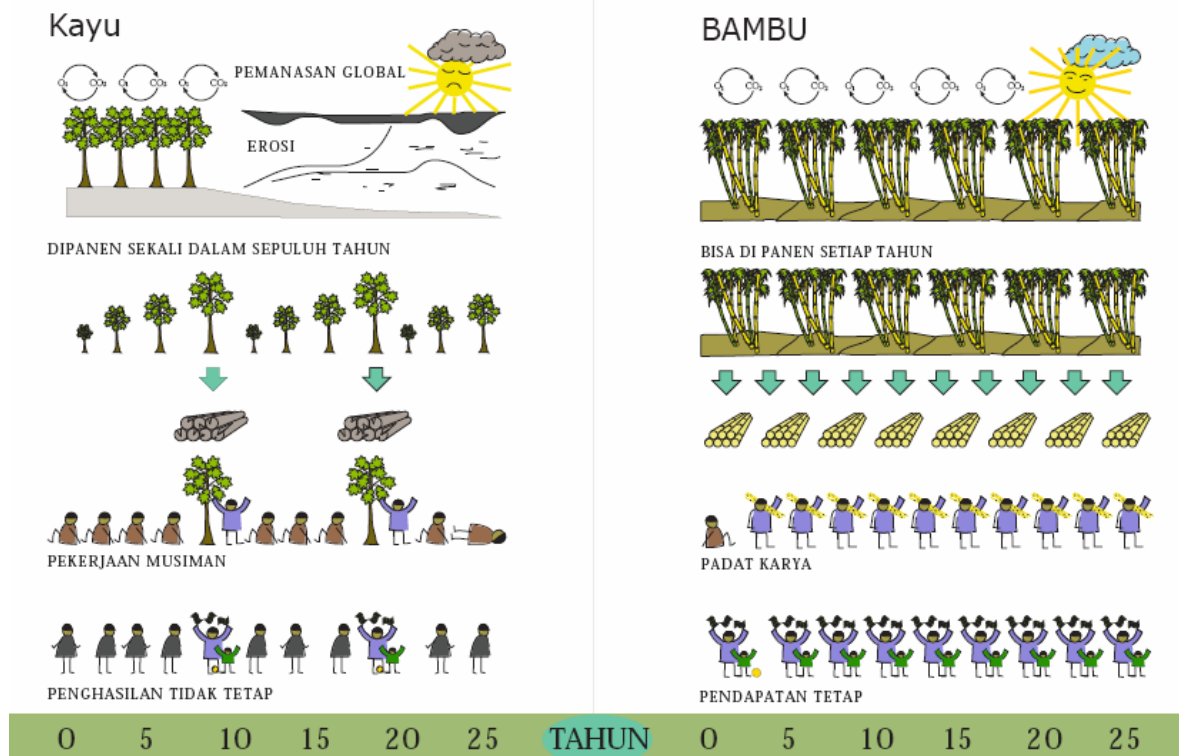
1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan meliputi antara lain pemilihan lokasi, jenis kegiatan, sosialisasi, rencana pembiayaan, dukungan dari pemerintah daerah setempat dan lain-lain.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan meliputi kegiatan persiapan, penyusunan rencana kegiatan, penyuluhan, pengerahan tenaga kerja, organisasi, tugas dan fungsi pelaksana, pengadaan dan penggunaan bahan/alat,

pelaksanaan kegiatan fisik, produktivitas pekerjaan, manfaat kegiatan bagi masyarakat petani, buruh tani dan warga miskin lainnya.

- Evaluasi terhadap pengendalian dan pengawasan meliputi peranan pengawasan, peranan masyarakat/lembaga masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti pembayaran UPK, pengeralahan tenaga kerja, teknis pelaksanaan pekerjaan fisik dan lain-lain.

Perbandingan Pemanfaatan Bambu dan Kayu

Konservasi bambu merupakan cara yang bijaksana dalam menjaga kelestarian lingkungan



BAB IV KESIMPULAN

1. Bahwa Transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.
3. Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah di kota besar yang timbul akibat terlalu banyaknya pekerja yang migrasi dari pedesaan.
4. Mengingat kegiatan padat karya ini merupakan wujud kepedulian dan keberpihakan Departemen Pertanian kepada rakyat kecil khususnya petani dan buruh tani serta warga miskin lainnya, maka seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat kecil.
5. Untuk terwujudnya pelaksanaan yang efisien dan efektif, setiap penanggungjawab kegiatan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara terinci.
6. Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.
7. Dengan melakukan transmigrasi dan proyek-proyek padat karya, diharapkan masalah pengangguran dan tingkat kriminalitas yang makin meningkat dapat dikurangi agar kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Geografi. 1997. *Pelajaran Geografi SLTP, Edisi ke-4*. Jakarta : Yudhistira.

Tim Geografi. 1995. *Belajar Aktif Geografi Jilid 1 SLTP*. Bandung : PT. Multi Adiwiyata

Daftar Situs :

- ☒ <http://www.nakertrans.go.id>
- ☒ <http://www.jatim.go.id/rpjm/bab332.pdf>
- ☒ <http://fkip.uns.ac.id/~pspe/Bahan%20Ajar%20P%20Darno%201.pdf>
- ☒ http://bamboocentral.org/PDF_files/VSDManual10vs2IND.pdf
- ☒ <http://www.oit.org/public/english/region/asro/jakarta/download/nadnias.pdf>
- ☒ http://pse.litbang.deptan.go.id/publikasi/AKP_1_2_2003_0.pdf
- ☒ <http://www.batan.go.id/ppen/Web%202005/SE/STATISTIK%20PENDUDUK%20INDONESIA.pdf>
- ☒ http://www.humanitarianinfo.org/sumatra/reference/HICLibrary/docs/Buku-4_Bidang_Ekonomi.pdf
- ☒ <http://www.disnakertrans-jateng.go.id/peraturan/20050323150529-UU%20TENTANG%20KETRANSMIGRASIAN%20NO%2015%20TAHUN%201997.PDF>
- ☒ <http://www.deptan.go.id/pla/pedoman/Juklak%20padat%20karya%20PLA%202006.pdf>
- ☒ http://bamboocentral.org/PDF_files/VSDManual10vs2IND.pdf